

Tantangan Literasi Informasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kota Semarang

Ana Irhandayaningsih^{1*)}

¹Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia

*) Korespondensi: irhandayaningsih@gmail.com

Abstract

This study aims to find out information literacy challenges for people living in the coastal area of Semarang City. These challenges include the absorption of information sources, access to information sources, and government regulations. The second objective is to find out information literacy challenges in women's groups in coastal communities, related to information on women's empowerment programs from the Semarang city government. Information literacy empowerment programs have several challenges, including information literacy in program planning, information literacy in program implementation, information literacy on program benefit taking, and information literacy in program evaluation. The research design used in this study is participatory action research, namely collection and analysis accompanied by a dialogue process between research objects. The location of the study was conducted in Mangkang Wetan Sub-District, Tugu City District, Semarang. The technique of data collection is done through filling out questionnaires, interviews, and focus group discussions to the research objects chosen through random sampling. Based on the results of the study, the challenge of information literacy in coastal communities is the low absorption of information, the small quantity of information sources, and the turbidity associated with information sources. Furthermore, the community at the research location has shown success in overcoming the challenges of information literacy in women's empowerment programs, starting from the planning, implementation, benefit taking, and program evaluation stages.

Keywords: *information literacy; coastal communities; women's empowerment programs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan literasi informasi pada masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Kota Semarang. Tantangan tersebut meliputi ketersediaan sumber informasi, akses sumber informasi, dan regulasi pemerintah. Tujuan kedua adalah mengetahui tantangan literasi informasi pada kelompok perempuan dalam masyarakat pesisir, terkait dengan informasi program pemberdayaan perempuan dari pemerintah Kota Semarang. Literasi informasi program pemberdayaan memiliki beberapa tantangan, meliputi literasi informasi pada perencanaan program, literasi informasi pada pelaksanaan program, literasi informasi pada pengambilan manfaat program, dan literasi informasi pada evaluasi program. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *participatory action research* yaitu pengumpulan dan analisis yang disertai proses dialog antar obyek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Mangkang Wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner, wawancara, dan *focus group discussion* kepada obyek penelitian yang dipilih melalui *random sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan literasi informasi masyarakat pesisir adalah serapan informasi yang rendah, kuantitas sumber informasi yang sedikit, dan kekerungan terkait sumber informasi. Selanjutnya, masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan literasi informasi dalam program pemberdayaan perempuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.

Kata kunci: *literasi informasi; masyarakat pesisir; program pemberdayaan perempuan*

1. Pendahuluan

Kota Semarang memiliki wilayah yang didominasi dataran rendah dan kawasan pesisir. Masyarakat pesisir secara umum melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumberdaya

laut. Sehingga masyarakat ini bergantung pada potensi dan kondisi sumberdaya pesisir dan lautan. Pola tersebut memiliki kaitan yang erat dengan karakteristik geografis dan kondisi alam dari wilayah pesisir yang merupakan pertemuan antara daratan dan wilayah lautan. Penyebab lainnya adalah pada karakteristik kepribadian sebagian besar individu yang tinggal di pesisir, serta kelembagaan sosial di wilayah pesisir. Menurut Koentjaraningrat (1990) masyarakat pesisir secara ekologis mempunyai cara hidup yang bervariasi, karena terdapat dua alternative pemanfaatan sumberdaya alam di lingkungan darat dan lingkungan air (laut dan tambak). Secara umum, masyarakat pesisir memanfaatkan sumberdaya air antara lain dengan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagai pekerjaan utama dan memanfaatkan sumberdaya daratan antara lain dilakukan dengan pertanian pada lahan semi-berpasir sebagai pekerjaan tambahan.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki perilaku yang berbeda dengan masyarakat petani dan masyarakat urban. Perbedaan ini didasari oleh sumberdaya bagi kehidupan sosial ekonomi setiap masyarakat. Masyarakat pesisir memiliki kehidupan sosial ekonomi yang tidak pasti, karena sumberdaya laut dan perikanan bersifat sulit prediksi (Coleman, 1990). Selain itu, sumberdaya tersebut mempunyai resiko kerugian yang tinggi serta menghasilkan keuntungan atau pendapatan yang fluktuatif. Hal tersebut juga berpengaruh pada sifat masyarakat pesisir yang sebagian besar memiliki sifat sebagian tempamental (Ambo, 2001).

Fluktuasi kehidupan social ekonomi masyarakat pesisir, menjadikan masyarakat pesisir memiliki penghasilan minim dan memiliki citra sebagai masyarakat miskin. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat pesisir memiliki keterbatasan akses untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pendidikan, penguasaan teknologi, memperluas pasar, dan menambah modal (Ambo, 2001).

Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan pesisir. Program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu program bagi rumah tangga, sosial masyarakat, dan pemberdayaan komunitas. Program bagi rumah tangga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi rumah tangga miskin di suatu lingkungan masyarakat pesisir. Program kedua, program sosial masyarakat, bertujuan untuk mendukung kegiatan komunitas non-produktif dalam masyarakat pesisir. Program ketiga, program pemberdayaan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir dan meningkatkan tingkan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini melibatkan pendamping dari kalangan profesional dan fasilitator (Agung, 2014). Namun secara umum hal tersebut belum optimal dan belum berpengaruh pada pengurangan kemiskinan di masyarakat pesisir (Nugroho, 2015).

Ketiga program tersebut sebagian besar memiliki pengelola dan target para perempuan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, dan karena penduduk laki-laki tidak memiliki waktu di luar pekerjaanya sebagai nelayan. Melalui program-program tersebut, para perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga selain dari aktivitas perikanan (Zakiah, 2010). Program tersebut menjadikan perempuan memiliki kemampuan produktif dan dapat menghasilkan penghasilan bagi rumah tangga.

Dalam struktur masyarakat pesisir, kaum perempuan memiliki beberapa peran. Dalam ranah domestic, perempuan pesisir memiliki peran sebagai sebagai isteri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Perempuan memiliki tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mengasuh dan mendidik, dan menyiapkan kebutuhan bekal suami melaut. Peran lainnya adalah peran produktif. Peran produktif adalah peran perempuan pesisir untuk memperoleh penghasilan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Usaha yang dilakukan perempuan pesisir untuk mendapatkan pendapatan ekonomi ini adalah dengan jalan menjualkan hasil tangkapan (ikan) suami; bekerja seperti menjadi buruh pada usaha pengolahan ikan; membuka toko/warung, pedagang perantara, dan pemilik usaha pengolahan hasil perikanan.

Kewajiban ketiga adalah ikut mengelola potensi komunitas, yang hasil akhirnya juga untuk kepentingan ekonomi dan investasi sosial rumah tangga masyarakat pesisir. Peranan ini diwujudkan dalam bentuk keterlibatan kaum perempuan mengikuti arisan, simpan-pinjam, sumbangan timbal-balik hajatan, dan kegiatan gotong-royong lainnya. Dengan memasuki pranata-pranata tersebut, perempuan pesisir berpartisipasi mengelola potensi sumber daya sosial ekonomi masyarakat yang suatu saat dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan rumah tangga, seperti ketika penghasilan dari melaut menurun, didera sakit, biaya hajatan keluarga, membeli keperluan sekolah anak, menyiapkan kebutuhan hari raya, atau kebutuhan mendadak lainnya. Perempuan pesisir sangat kreatif menciptakan berbagai jenis pranata sosial-ekonomi sebagai jawaban untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dari kegiatan penangkapan.

Ketiga jenis tanggung jawab di atas telah menempatkan posisi sosial dan peranan ekonomi perempuan pesisir yang cukup kuat dan mendominasi, baik pada tataran rumah tangga, maupun tataran masyarakat. Pada tataran rumah tangga, perempuan pesisir menjadi "salah satu tiang ekonomi" rumah tangga, sejajar dengan suami-suami mereka. Hubungan fungsional suami-isteri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bersifat saling-melengkapi. Perempuan pesisir tidak sekedar "melengkapi atau membantu" pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi ikut menentukan tersedianya sumber daya ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tiang ekonomi rumah tangga itu akan terancam roboh. Karena posisi ekonomi perempuan seperti ini, posisi sosial mereka dalam berhadapan dengan suami di rumah tangga juga cukup kuat. Isteri mengontrol sebagian besar pengelolaan dan pengeluaran sumber daya ekonomi rumah tangga. Tidak ada pengeluaran sumber daya ekonomi rumah tangga, termasuk memenuhi kebutuhan suami, seperti membeli rokok dan perlengkapan melaut, yang terlepas dari "restu" isteri. Pola-pola perilaku kultural ini dipandang sebagai kewajiban dan kebajikan yang harus dipatuhi suami-isteri nelayan agar rumah tangga terjaga keutuhannya (Kusnadi, 2006).

Guna mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Semarang membantu melalui program pemberdayaan bagi perempuan di kawasan pesisir. Program tersebut bertujuan untuk membuka akses peningkatan keterampilan, akses sumberdaya ekonomi, serta peningkatan partisipasi perempuan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi rumah tangga. Jumlah perempuan yang besar menjadi modal

yang potensial untuk membawa perubahan signifikan di kalangan masyarakat pesisir. Guna mencapai tujuan tersebut, para perempuan memerlukan kemampuan literasi informasi yang baik.

Literasi informasi (kegiatan membaca dan menulis) merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pesisir (Maulana, 2015). Literasi informasi menjadi satu-satunya cara untuk memperluas ilmu pengetahuan dan skill. Sehingga masyarakat dengan kemampuan literasi informasi dapat memanfaatkan teknologi, mengetahui strategi dalam kegiatan ekonomi - termasuk menguasai pasar dan modal-, mengetahui pola hidup sehat, dan pengetahuan lainnya (Adam, 2016).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa literasi informasi memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir. Hal ini dapat dipahami, karena literasi informasi merupakan salah satu aktifitas penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi seseorang. Beberapa manfaat literasi informasi adalah untuk mendukung kesuksesan belajar sepanjang hayat, serta dapat memberi kontribusi dalam perkembangan pengajaran dan pembelajaran. Oleh karena itu budaya literasi yang tertanam dalam diri individu berpengaruh pada tingkat keberhasilan baik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya literasi pada individu dan masyarakat tentu tidak muncul begitu saja. Namun untuk mewujudkan budaya literasi informasi yang baik, diperlukan proses yang panjang dan sarana yang kondusif. Budaya literasi informasi bersifat akumulatif yang menghasilkan pembiasaan, dimulai sejak kecil dan didukung oleh lingkungan keluarga serta lingkungan, baik itu di lingkungan rumah maupun sekolah. Pembiasaan yang muncul pada kelompok-kelompok individu secara kolektif akan memunculkan budaya literasi yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.

Secara umum, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir belum memiliki budaya literasi informasi. Terdapat beberapa kajian yang menunjukkan rendahnya budaya literasi, salah satu faktor yang mendasar adalah tidak adanya pembiasaan aktivitas membaca. Beberapa data statistic menunjukkan hal tersebut. Kemampuan membaca (*reading ability*) anak-anak Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan dalam kawasan ASEAN sekali pun. Menurut International Association for Evaluation of Educational (IEA) pada tahun 1992, Indonesia berada di urutan ke-29 (dari 30 negara) dalam hal kemampuan membaca untuk kelompok umur siswa Sekolah Dasar Kelas IV. Data ini juga relevan dengan hasil studi dari Vincent Greannary yang dikutip oleh World Bank dalam sebuah Laporan Pendidikan “Education in Indonesia From Crisis to Recovery” tahun 1998. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak-anak kelas VI Sekolah Dasar di Indonesia hanya memiliki skor nilai 51,7. Sebagai perbandingan, rata-rata skor siswa di Filipina yang adalah memperoleh nilai 52,6; rata-rata skor siswa di Thailand adalah 65,1 serta rata-rata skor siswa di Singapura adalah nilai 74,0 dan rata-rata skor siswa di Hongkong adalah 75.5.

Berdasarkan laporan UNDP tahun 2003 dalam “Human Development Report 2003” untuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks – HDI) berdasarkan angka buta

huruf menunjukkan bahwa “pembangunan manusia di Indonesia“ menempati urutan yang ke 112 dari 174 negara di dunia yang dievaluasi. Sebagai perbandingan, Vietnam menempati urutan ke 109. Padahal negara itu baru saja keluar dari konflik politik yang cukup besar (Supriadi, 2005).

Data statistik yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2003 juga dapat dijadikan gambaran bagaimana minat baca bangsa Indonesia. Data itu menggambarkan bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran tiap minggu hanya 55,11 % sedangkan yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22 %, buku cerita 16,72 %, buku pelajaran sekolah 44,28 %, dan yang membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 %. Sementara Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan membaca sebagai informasi. Menurut data tersebut, masyarakat lebih memilih televisi dan mendengarkan radio. Malahan, kecenderungan cara mendapatkan informasi lewat membaca stagnan sejak 1993. Hanya naik sekitar 0,2 %. Jauh jika dibandingkan dengan menonton televisi yang kenaikannya mencapai 21,1 %. Data 2006 menunjukkan bahwa orang Indonesia yang membaca untuk mendapatkan informasi baru 23,5 % dari total penduduk sedangkan menonton televisi sebanyak 85,9 % dan mendengarkan radio sebesar 40,3 %. (Rohanda, 2012)

Tingkat literasi informasi pada suatu masyarakat memiliki korelasi yang tinggi dengan program peningkatan pendidikan dan sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dengan menggunakan beberapa parameter. Rachmawati (2019) melakukan pemetaan tingkat literasi dengan tiga parameter. Parameter pertama adalah yaitu ketersediaan dan keterserapan sumber informasi. Parameter kedua adalah akses terhadap sumber informasi. Parameter yang ketiga adalah dukungan regulasi pemerintah terhadap program literasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum menunjukkan secara detail tantangan literasi informasi dalam kerangka program pemberdayaan perempuan di kawasan pesisir Kota Semarang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah :

- Mengetahui tantangan literasi informasi di kalangan perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pesisir Kota Semarang. Adapun aspek tantangan tersebut dijabarkan ke dalam tiga aspek, yaitu : (i) keterserapan sumber informasi, (ii) akses terhadap sumber informasi, dan (iii) dukungan regulasi pemerintah kota.
- Mengetahui tantangan literasi informasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pesisir Kota Semarang, yang meliputi : (i) literasi informasi pada perencanaan program, (ii) literasi informasi pada pelaksanaan program, (iii) literasi informasi pada pengambilan manfaat program, dan (iv) literasi informasi pada evaluasi program

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *participatory action research* dalam dua tahap serta mendorong interaksi antar obyek penelitian. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan

dan menganalisis data kualitatif. Tahap kedua adalah mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Pada tahap pertama, penelitian ini menggunakan metode focus group discussion (FGD), wawancara random sampling, observasi, serta melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis datanya dilakukan dengan memadukan data kualitatif yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Pada tahap kedua, pemetaan aspek-aspek literasi informasi didasarkan pada kualitatif hasil FGD dan wawancara, dan kuantitatif melalui angket. Data kualitatif didapatkan melalui FGD dan wawancara dengan partisipan. Data kuantitatif didapatkan melalui angket berupa kuesioner. Kuesioner ini berisi pernyataan-pertanyaan mengenai Literasi informasi dalam program pemberdayaan perempuan. Setiap pernyataan yang pada kuesioner disertai dengan lima pilihan jawaban atau respon yang dapat dipilih oleh responden. Jawaban yang tercantum dalam kuesioner mengacu pada Skala Likert. Kuesioner ini merupakan pendekatan untuk mengetahui tingkat literasi informasi dari tiap perempuan responden.

3. Hasil Penelitian

Hasil pertama dari penelitian ini adalah pemetaan literasi informasi di kalangan perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pesisir Kota Semarang. Hasil kedua dari penelitian ini adalah pemetaan aspek-aspek literasi informasi yang terkait dengan pemberdayaan perempuan yang tinggal di kawasan pesisir pesisir Kota Semarang.

3.1 Pemetaan literasi informasi di kalangan perempuan

Pemetaan ini didasarkan pada tiga aspek, yaitu : (i) ketersediaan sumber informasi, (ii) akses sumber informasi, dan (iii) dukungan regulasi pemerintah.

3.1.1 Keterserapan Sumber Informasi

Ketersediaan dan ketersediaan sumber informasi di lokasi penelitian berupa sebuah perpustakaan umum desa dan sebuah taman baca yang dikelola oleh kelompok posdaya. Kebiasaan membaca individu untuk kelompok non-pelajar masih sangat rendah, yaitu satu hingga dua buku per tahun. Sedangkan kebiasaan membaca individu untuk kelompok pelajar memiliki nilai yang lebih baik yaitu lebih dari sepuluh buku per tahun.

3.1.2 Akses Sumber Informasi

Para perempuan (kelompok non pelajar) di lokasi penelitian memperoleh sumber informasi hanya dengan meminjam pada sarana perpustakaan dan taman baca posdaya. Sedangkan kelompok perempuan yang berstatus pelajar memiliki akses dan cara perolehan sumber informasi yang lebih beragam. Kelompok ini dapat meminjam pada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, meminjam kepada teman sekolah, ataupun membeli di toko buku. Kelompok perempuan non pelajar pada umumnya tidak mengakses melalui toko buku karena jarak dan biaya.

Rasio jumlah perempuan terhadap sumber informasi (buku/bahan bacaan) yang tersedia di perpustakaan desa dan taman baca adalah (9 : 1), artinya 1 buku dipergunakan oleh 9 orang. Sedangkan kondisi yang ideal adalah 1 : 5 atau satu buku dibaca oleh 5 orang.

3.1.3 Dukungan Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah Kota Semarang terkait literasi informasi cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya program pemerintah untuk pengembangan fisik dan penambahan koleksi perpustakaan desa. Pembangunan fisik perpustakaan dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penambahan koleksi dilakukan setiap tahun dengan dibiayai anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) dan dana alokasi khusus (DAK). Hal yang masih menjadi kekurangan adalah belum adanya aspek legislasi atau peraturan daerah yang khusus mengatur pengembangan budaya baca masih lemah, atau peraturan peran perpustakaan dalam mendukung tercapainya budaya literasi.

3.2 Pemetaan literasi informasi di kalangan perempuan yang terkait dengan program pemberdayaan

Pemetaan ini didasarkan pada empat aspek, yaitu : (i) kegiatan perencanaan, (ii) kegiatan pelaksanaan, (iii) pengambilan manfaat, dan (iv) evaluasi.

3.2.1 Literasi informasi dalam Pengambilan Keputusan/ Perencanaan

Aspek ini diukur melalui empat indikator yaitu : a) Informasi program pemberdayaan perempuan didapatkan melalui perangkat pemerintah (kelurahan atau RT/RW), b) Masyarakat menerima informasi tersebut dan dapat memahami, c) Masyarakat mencari tahu lebih jauh mengenai program pemberdayaan perempuan, d) Pernah memberikan masukan gagasan/ ide dalam program pemberdayaan perempuan.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi informasi yang baik dalam pengambilan keputusan/perencanaan program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 190 dengan skor median 150.

3.2.2 Literasi informasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Aspek ini diukur melalui tiga indikator yaitu a) memahami informasi yang diberikan selama pelaksanaan program, b) dapat menjawab pertanyaan yang diberikan selama pelaksanaan program, dan c) pernah membantu dalam pelaksanaan program, seperti menjadi petugas administrasi atau kader.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi informasi yang baik selama pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 210 dengan skor median 150.

3.2.3 Literasi informasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat

Aspek ini diukur melalui tiga indikator yaitu : a) para perempuan mengalami peningkatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, b) para perempuan pernah mengajarkan keterampilan yang didapat selama program kepada keluarga atau lingkungan, dan c) para perempuan mendapat manfaat ekonomi dari keterampilan yang didapat.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi informasi yang baik untuk mengambil manfaat dari program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 192 dengan skor median 150.

3.2.4 Literasi informasi Masyarakat dalam Evaluasi Program

Aspek ini diukur melalui tiga indikator yaitu : a) Pernah memberi saran kepada pengelola program, b) Pernah memberikan keluhan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pengelola program, c) Pernah membantu pengelola program dalam menyusun pelaporan kegiatan.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa para perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat literasi informasi yang baik untuk mengambil memberikan evaluasi dari program pemberdayaan perempuan. Hasil perhitungan rata-rata skor likert untuk indikator ini adalah 180 dengan skor median 150.

Hasil perhitungan skor kuesioner untuk keempat aspek menunjukkan hasil yang baik. Pada aspek pengambilan keputusan/ perencanaan program, pelaksanaan program, dan pengambilan manfaat, skor rata-rata antara nilai median dan berada di nilai batas kuartil III. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat dapat menerima program pemberdayaan perempuan dan dapat mengambil manfaat dari program tersebut. Bahkan, pada aspek pelaksanaan program skor rata-ratanya adalah berada di atas batas kuartil tiga. Hal ini menunjukkan para perempuan telah menyerap informasi dengan sangat baik selama pelaksanaan program.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa para perempuan di lokasi penelitian memiliki kemampuan literasi informasi yang baik, didukung pula dengan minat dan antusiasme yang tinggi untuk mengembangkan diri tanpa tergantung dengan minimnya ketersediaan sumber informasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan literasi informasi masyarakat pesisir adalah serapan informasi yang rendah, kuantitas sumber informasi yang sedikit, dan kekerungan terkait sumber informasi. Selanjutnya, masyarakat di lokasi penelitian telah menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi tantangan literasi informasi dalam program pemberdayaan perempuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.

5. Daftar Pustaka

Adam, C.; Buetow, S.; Edlin, R.; Zdravkovic, N. and Heyhinger, J. 2016. A Collaborative Approach to Integrating Information and Academic Literacy into the Curricular of Research Methods Course. *The Journal of Academic Librarianship* 42(3), pp 221-231

Agung U, Titin H H. 2014. Model of empowering poor women through training of local potentialbased entrepreneurship in District of Wedi Klaten Regency *J.of Humanities Research* 19(2) pp154-167

- Ambo, T H. 2011. Management of Coastal and Marine Ecotourism. Surabaya Brilliant International.
- Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press
- Koentjaraningrat. 1990. Beberapa pokok antropologi sosial. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Kusnadi. 2005. Karakteristik Industri Pengolahan Perikanan di Madura Timur. Jember: Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jember : Lembaga Penelitian UNEJ
- Maulana F, Rikrik R,. 2015. Role of fisherman's wife in household improvement (case study in Penjab Village Pemangkat District Sambas Regency) J. of Socioeconomic Marine and Fisheries 10 (2) pp. 241-249
- Nugroho, M. 2015. Fishermen empowerment in Pasuruan District : Study of development of human resource empowerment model in coastal area. J.of Food Technology 6(1) pp 19-26
- Rachmawati, T. S. 2019. Study on Mapping of Information Literature Culture in South Coastal Communities West Java Province. Record And Library Journal 4(1), pp 1-6
- Rohanda & Winoto, Y. (2012). Pemetaan budaya literasi di Jawa Barat di 4 wilayah dan 6 Kabupaten/kota. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Supriadi, D. (2005). Membangun Bangsa Melalui Pendidikan. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Zakiah. 2010. Empowerment of women by Lajnah women J. of Assessment of Religious Social 17 p 44